

KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI http://kliping.dpr.go.id

Judul : Demokrat Tolak Interpelasi Hambalang

: Jumat, 16 November 2012 **Tanggal**

Surat Kabar : Suara Pembaruan

Halaman

Demokrat Tolak Interpelasi Hambalang

[JAKARTA] Badan Akunta-bilitas keuangan Negara (BAKN) DPR meminta Ko-misi Pemberantasan Korupsi (BAKN) DPR meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan penyidikan dan penuntutan terhadap proyek Pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Hal tersebut merupakan salah satu hasil rekomendasi BAKN kepada Pimpinan DPR pada Rabu (14/11). Wakil Ketua DPR Anis Mata yang menerima secara langsung hasil rekomendasi BAKN tersebut mendasi BAKN tersebut mengatakan, tak menutup kemungkinan DPR bisa saja mengajukan usulan hak interpelasi. "Soal desakan agar DPR meng-

mekanisme dan prosedurnya. Mungkin temuan BAKN DPR bisa menjadi rujukan," kata Anis Matta usai menerima pimpinan dan anggota BAKN, di Jakarta, Rabu (14/11).

Namun adanya wacana ditolak Partai Demokrat. Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi Partai Demokrat. Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi Partai Demokrat (PD) Ruhut Sitompul berpendapat, usulan interpelasi tersebut tidak akan terwujud. "Usulan interpelasi tak mungkin terjadi. Mereka (anggota DPR yang mendorong interpeleasi) hanya mimpi di tengah jalan," tukas Ruhut. Anggota Komisi III DPR tersebut beralasan, dari sembilan fraksi di DPR, hanya dua fraksi besar yang bakal mendukung interpelasi. Kedua fraksi itu adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan (PDI-P). Sedangkan, fraksi yang tersisa bakal menolak usulan interpelasi. "Aku tertawa termehek-mehek dengan adanya usul interpelasi kasus Hambalang," ucapnya.

Dia menambahkan, wacana interpelasi atas proyek P3SON sarat dengan muatan politis. Target dari interpelasi tentu untuk menggoyang stabilitas pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono. Menurut Ruhut, daripada menyatakan interpelasi, lebih baik penyimpangan P3SON diserahkan kepada proses hukum.

Koordinator Investigasi

terpelasi.
"Soal desakan agar DPR mengajukan usulan hak interpelasi, nanti akan disampaikan pada rapat. Pengajuan usulan hak interpelasi itu ada mekanisme dan prosedurnya. Mungkin temuan kan kan bak interpelasi itu ada mekanisme dan prosedurnya. Mungkin temuan kan kan bak interpelasi itu ada mekanisme dan prosedurnya. Mungkin temuan kan kan bak interpelasi ini bagus untuk mendorong lebih cepat agar kasus ini cepat selesai baik secara politik maupun hukum.

Kum.

Koordinator Investigasi
dan Advokasi Forum Indonesia untuk
Transparansi
Anggaran
(Fitra)
Uchok Sky
Khadafi menestakan sangatakan sa-lah satu Re-komendasi BAKN yang juga sangat

balk
bolitik

bolitik